

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

4.1.1 Deskripsi Wilayah Kota Bandung

Kota Bandung terletak di wilayah Jawa Barat dan merupakan Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat. Kota Bandung terletak diantara 107 0 Bujur Timur dan 6 0 55' Lintang Selatan. Lokasi Kotamadya Bandung cukup strategis, dilihat dari segi komunikasi, perekonomian maupun keamanan. Hal tersebut disebabkan oleh :

- a. Kota Bandung terletak pada pertemuan poros jalan raya :
 - Barat Timur yang memudahkan hubungan dengan Ibukota Negara.
 - Utara Selatan yang memudahkan lalu lintas ke daerah perkebunan (Subang dan Pangalengan).
- b. Letak yang tidak terisolasi serta dengan komunikasi yang baik akan memudahkan aparat keamanan untuk bergerak ke setiap penjuru. Secara topografis Kota Bandung terletak pada ketinggian 768 meter di atas permukaan laut, titik tertinggi di daerah Utara dengan ketinggian 1.050 meter dan terendah di sebelah Selatan adalah 675 meter di atas permukaan laut. Di wilayah Kotamadya Bandung bagian Selatan permukaan tanah relatif datar, sedangkan di wilayah kota bagian Utara berbukit-bukit sehingga merupakan panorama yang indah.



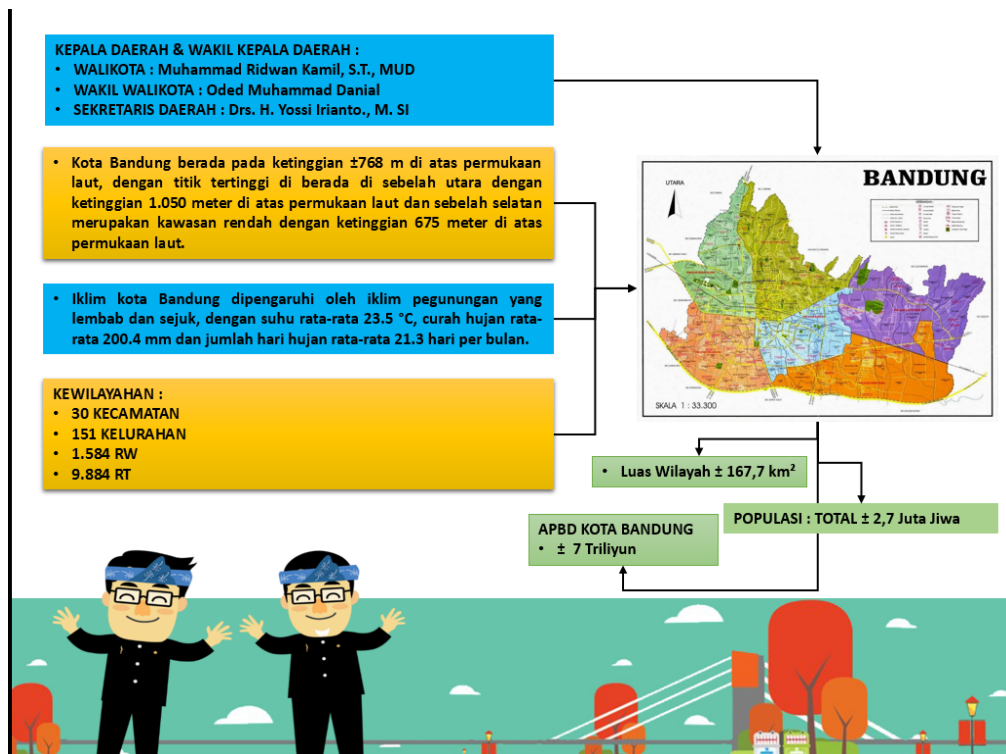
uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Keadaan Geologis dan tanah yang ada di Kota Bandung dan sekitarnya terbentuk pada zaman Kwartier dan mempunyai lapisan tanah alluvial hasil letusan gunung Takuban Perahu. Jenis material di bagian Utara umumnya merupakan jenis andosol, dibagian Selatan serta Timur terdiri atas sebaran jenis alluvial kelabu dengan bahan endapan tanah liat. Di bagian Tengah dan Barat tersebar jenis andosol.

Iklim kota Bandung dipengaruhi oleh iklim pegunungan yang lembab dan sejuk. Pada tahun 1998 temperatur rata-rata 23,5 °C, curah hujan rata-rata 200,4 mm dan jumlah hari hujan rata-rata 21,3 hari perbulan.

Gambar Deskripsi Kota Bandung



(Sumber : Selayang Pandang Pemerintahan Kota Bandung)

➤ **VISI dan MISI KOTA BANDUNG**

➤ **VISI KOTA BANDUNG :**

"TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG SEBAGAI KOTA JASA YANG BERMARTABAT(BERSIH, MAKMUR, TAAT DAN BERSAHABAT)"

➤ **MISI KOTA BANDUNG**

Misi adalah tugas yang diemban Pemerintah Kota Bandung meliputi :

1. Mengembangkan sumber daya manusia yang handal yang religius, Yang mencakup pendidikan, kesehatan dan moral keagamaan.
2. Mengembangkan perekonomian kota yang adil, yang mencakup peningkatan perekonomian kota yang tangguh, sehat dan berkeadilan dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha.
3. Mengembangkan Sosial Budaya Kota yang ramah dan berkesadran tinggi, serta berhati nurani, yang mencakup peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan ketenagakerjaan, meningkatkan kesejahteraan sosial, keluarga, pemuda dan olah raga serta kesetaraan gender.
4. Meningkatkan penataan Kota, yang mencakup pemeliharaan serta peningkatan prasarana dan sarana kota agar sesuai dengan dinamika peningkatan kegiatan kota dengan tetap memperhatikan tata ruang kota dan daya dukung lingkungan kota .

5. Meningkatkan kinerja pemerintah kota secara professional, efektif, efisien akuntabel dan transparan, yang mencakup pemberdayaan aparatur pemerintah dan masyarakat.

6. Mengembangkan sistem keuangan kota , mencakup sistem pembiayaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, swasta dan masyarakat.

4.1.2 Gambaran Umum Bagian Pemerintahan Kota Bandung

4.1.2.1 Sejarah Berdirinya Instansi

Bagian Pemerintahan Umum berdiri sejak tanggal 1 Januari 2008, Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung, Kedudukan Sekretariat Daerah yang merupakan unsur staf, dipimpin Sekretaris Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dan menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan perangkat daerah, untuk melaksanakan tugas pokok dan kewajiban tersebut Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah;
- b) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;

- c) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah;
- d) Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah; dan
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. Maka secara umum tolok ukur keberhasilan serta akuntabilitas kinerja program dan kegiatan pelayanan pada tiap bagian di lingkungan sekretariat daerah adalah:

- 1) Produktifitas serta kualitas perumusan dan penetapan kebijakan pemerintah daerah yang relevan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- 2) Kapasitas koordinasi, pembinaan administratif dan aparatur, monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap implementasi kebijakan pemerintah daerah tersebut dalam tugas pokok dan fungsi perangkat daerah (SKPD) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- 3) Kapasitas dukungan terhadap kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kepala daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut, susunan Bagian Pemerintahan Umum, membawahkan :

- a) Sub Bagian Tata Pemerintahan
- b) Sub Bagian Bina Pemerintahan Kewilayahan dan
- c) Sub Bagian Bina Pemerintahan Otonomi Daerah.

4.1.2.2 Struktur Organisasi dan Bagan Tupoksi Bagian Pemerintahan

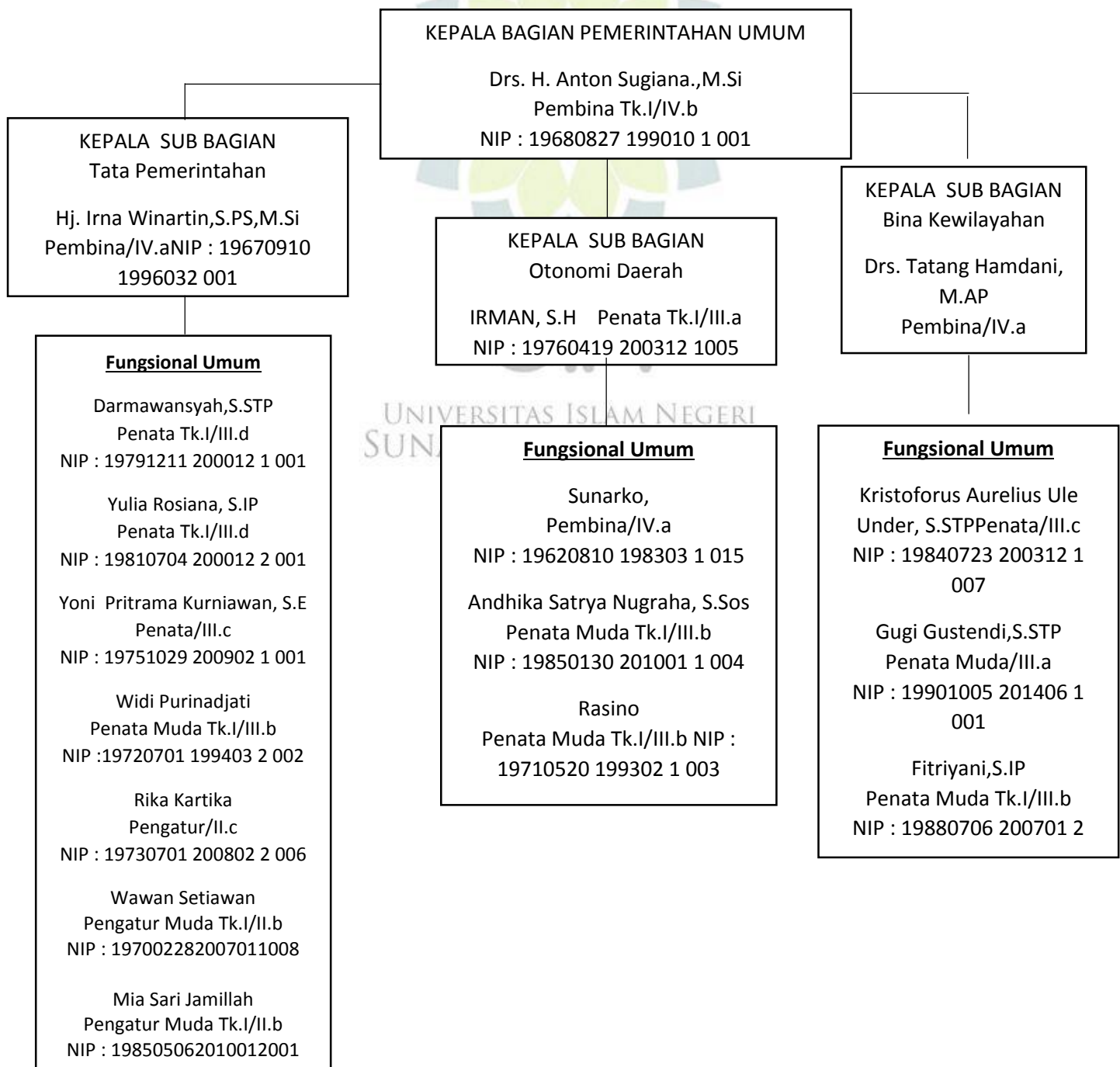
Struktur organisasi diperlukan bagi instansi agar tercipta situasi kerja teratur dan lancar tanpa terjadi tumpang tindih tugas, wewenang, dan tanggung jawab.

Berikut ini merupakan gambaran struktur organisasi Bagian Pemerintahan Umum

Kota Bandung :

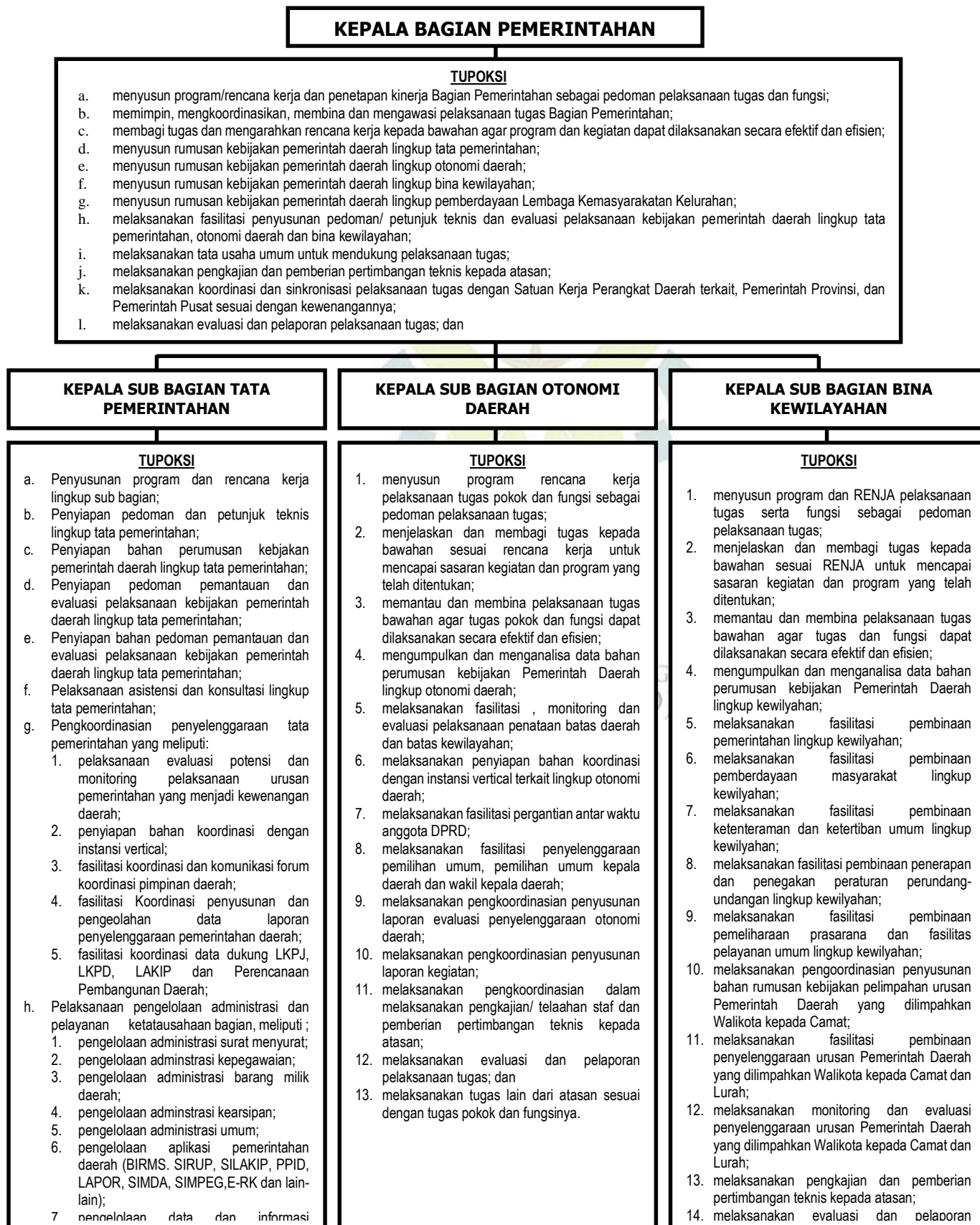
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BAGIAN PEMERINTAHAN SEKERTARIAT DAERAH KOTA BANDUNG

Gambar 2.1



BAGAN TUPOKSI BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG

Gambar 2.2



4.1.2.3 Kegiatan Umum Instansi

Bagian Pemerintahan umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Asisten pemerintah lingkup pemerintah umum.

1. KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM

- Kepala Bagian Pemerintahan Umum mempunyai tugas pokok yaitu:
 - a. Menyusun program/rencana kerja dan penetapan kinerja Bagian Pemerintahan Umum sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - b. Memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan tugas Bagian Pemerintahan Umum;
 - c. Membagi tugas dan mengarahkan rencana kerja kepada bawahan agar program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
 - d. Menyusun rumusan kebijakan pemerintah daerah lingkup bina kecamatan;
 - e. Menyusun rumusan kebijakan pemerintah daerah lingkup bina kelurahan;
 - f. Menyusun rumusan kebijakan pemerintah daerah lingkup tata pemerintahan dan otonomi daerah;
 - g. Melaksanakan fasilitasi penyusunan pedoman/ petunjuk teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah lingkup bina kecamatan, bina kelurahan, serta tata pemerintahan dan otonomi daerah;

- h. Melaksanakan tata usaha umum untuk mendukung pelaksanaan tugas;
 - i. Melaksanakan pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis kepada atasan;
 - j. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya;
 - k. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - l. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- 2. Kepala Sub Bagian Tata Pemerintahan**
- a. Penyusunan program dan rencana kerja lingkup sub bagian;
 - b. Penyiapan pedoman dan petunjuk teknis lingkup tata pemerintahan;
 - c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah lingkup tata pemerintahan;
 - d. Penyiapan pedoman pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah lingkup tata pemerintahan;
 - e. Penyiapan bahan pedoman pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah lingkup tata pemerintahan;
 - f. Pelaksanaan asistensi dan konsultasi lingkup tata pemerintahan;
 - g. Pengkoordinasian penyelenggaraan tata pemerintahan yang meliputi:

1. pelaksanaan evaluasi potensi dan monitoring pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
 2. penyiapan bahan koordinasi dengan instansi vertical;
 3. fasilitasi koordinasi dan komunikasi forum koordinasi pimpinan daerah;
 4. fasilitasi Koordinasi penyusunan dan pengolahan data laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 5. fasilitasi koordinasi data dukung LKPJ, LKPD, LAKIP dan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- h. Pelaksanaan pengelolaan administrasi dan pelayanan ketatausahaan bagian, meliputi ;
1. pengelolaan administrasi surat menyurat;
 2. pengelolaan administrasi kepegawaian;
 3. pengelolaan administrasi barang milik daerah;
 4. pengelolaan administrasi kearsipan;
 5. pengelolaan administrasi umum;
 6. pengelolaan aplikasi pemerintahan daerah (BIRMS, SIRUP, SILAKIP, PPID, LAPOR, SIMDA, SIMPEG, E-RK dan lain-lain);
 7. pengelolaan data dan informasi pemerintahan daerah.
- i. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- j. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3. Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah

- a. menyusun program rencana kerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai rencana kerja untuk mencapai sasaran kegiatan dan program yang telah ditentukan;
- c. memantau dan membina pelaksanaan tugas bawahan agar tugas pokok dan fungsi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- d. mengumpulkan dan menganalisa data bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah lingkup otonomi daerah;
- e. melaksanakan fasilitasi , monitoring dan evaluasi pelaksanaan penataan batas daerah dan batas kewilayahan;
- f. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan instansi vertical terkait lingkup otonomi daerah;
- g. melaksanakan fasilitasi pergantian antar waktu anggota DPRD;
- h. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- i. melaksanakan pengkoordinasian penyusunan laporan evaluasi penyelenggaraan otonomi daerah;
- j. melaksanakan pengkoordinasian penyusunan laporan kegiatan;

- k. melaksanakan pengkoordinasian dalam melaksanakan pengkajian/ telaahan staf dan pemberian pertimbangan teknis kepada atasan;
- l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

4.1.2.4 Profil Kecamatan dan Kelurahan

a. Gambaran Umum Kecamatan Cinambo

1. Sejarah Ringkas

Sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 tahun 2007 tentang pemekaran perubahan dan pembentukan Kecamatan dan Kelurahan dalam Daerah Kota Bandung bahwa tujuan yang dilakukannya adalah dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan peningkatan efektifitas dilakukan mengingat jarak antara Pusat Kecamatan dan Kelurahan yang cukup variatif serta semakin meningkatnya Kepadatan penduduk pada beberapa Kecamatan.

Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota Camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Kecamatan Cinambo yang merupakan Kecamatan hasil pemekaran dari wilayah Induk

Kecamatan Ujung Berung yang memiliki luas Wilayah kurang lebih :454.93 Ha .

Secara administrasi Kecamatan Cinambo memiliki 4 Kelurahan yaitu :

1. Kelurahan Pakemitan (0001)
2. Kelurahan Sukamulya (0002)
3. Kelurahan Cisaranten Wetan (0003)
4. Kelurahan Babakan Penghulu (0004)

Dengan dilakukannya pemekaran ini diharapkan akan berdampak pada peningkatan kinerja Pemerintah , terutama menyangkut dengan kewajiban memberikan pelayanan yang berkualitas terhadap masyarakat, peningkatan kesejahteraan melalui pembangunan serta menciptakan suasana tentram dan aman bagi masyarakat.

Batas batan wilayah Kecamatan Cinambo adalah :

- » Sebelah Selatan : Kecamatan Gedebage
- » Sebelah Utara : Kecamatan Ujung Berung
- » Sebelah Timur : Kecamatan Panyileukan
- » Sebelah Barat : Kecamatan Arcamanik

b. Letak Geografi

Secara geografis Kecamatan Cinambo memiliki bentuk wilayah daftar/berombak sebesar 15% dari total keseluruhan luas wilayah. Ditinjau dari sudut ketinggian tanah Kecamatan Cinambo berada pada ketinggian 500 meter diatas permukaan laut. Suhu maksimum dan minimum berkisar 25-30 C, sedangkan dilihat dari segi hujan berkisar

2400 mm/th dan jumlah hari dengan curah hujan yang terbanyak sebesar 45 hari.

c. Visi dan Misi Kecamatan Cinambo

Visi Kecamatan Cinambo tersebut merupakan bagian yang terintegrasi dan tidak terpisahkan dengan visi Kota Bandung yaitu memantapkan ***Kota Bandung sebagai Kota Jasa Yang Bermartabat (bersih makmur dan bersahabat)***

Misi Kecamatan Cinambo

1. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat
2. Meningkatkan Kualitas Usaha Ekonomi Masyarakat
3. Mengembangkan Seni Budaya yang Dinamis
4. Meningkatkan Penataan Lingkungan
5. Meningkatkan Kualitas SDM Aparatur yang Profesional

Berdasarkan peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 tahun 2007 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kota Bandung.

Struktur Organisasi Kecamatan Cinambo terdiri dari :

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan, membawahi :
 - a. Sub. Bagian Umum dan kepegawaian
 - b. Sub. Bagian Program dan Keuangan
3. Seksi pemerintahan
4. Seksi Ketentraman dan ketertiban

5. Seksi Pendidikan dan Kmasayarakatan
6. Seksi Ekbang dan LH
7. Seksi Pelayanan.

Berdasarkan peraturan Walikota Bandung Nomor 6 tahun 2007 tentang uraian tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan Kelurahan Kota Bandung. Kecamatan Cinambo mempunyai tugas yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah sebagai berikut.

a. Tugas

Melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan Kepala daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah.

b. Fungsi

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintah di tingkat kecamatan;
6. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah Kelurahan.

1. Data kependudukan Kecamatan Cinambo
2. Data potensi wilayah Kelurahan dan Kecamatan
3. Data permasalahan di wilayah Kecamatan
4. Data Administrasi Pemerintahan

Jumlah pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga dalam rangka ketertiban administrasi kependudukan di Kecamatan Cinambo bervariasi sesuai dengan luas wilayah Kelurahan yang dimiliki serta kepadatan penduduk di daerah tersebut.

Data Pengurus RT dan RW

No	Kelurahan	Rukun Warga (RW)	Rukun Tetangga (RT)
1	Pakemitan	5	23
2	Sukamulya	6	25
3	Cisaranten Wetan	6	25
4	Babakan Penghulu	8	27
	Jumlah	25	100

b. Gambaran Umum Kelurahan Pasir Biru

1. DATA STATIS

A. KONDISI EKSISTING KELURAHAN PASIRBIRU KECAMATAN CIBIRU

Kelurahan pasirbiru kecamatan Cibiru merupakan salah satu bagian wilayah Kota Bandung dengan memiliki lahan seluas 110 Ha.

Secara administrasi kelurahan Pasirbiru dibatasi oleh :

- Bagian Selatan : Kelurahan Cipadung kidul dan solokan Cibiru

- Bagian Utara : Kelurahan Palasari
- Bagian Timur : Kelurahan Kabupaten Bandung (Desa Cibiru Wetan)
- Bagian Barat : Kelurahan Cipadung

B. Pemerintahan Kelurahan

Data kondisi Kantor Kelurahan

No	Uraian	Data	Ket.
1	Status kepemilikan	Pemkot BANDUNG	
2	Luas tanah	$\pm 1000 \text{ M}^2$	Termasuk AULA
3	Luas bangunan	547 M^2	
4	Tahun pendirian	1974	Pemerintah
5	Sumber biaya	APBD KOTA BANDUNG	
6	Kondisi bangunan kantor	SEDANG	SEDANG


 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 SUNAN GUNUNG DJATI
 BANDUNG

Data sarana kerja kantor kelurahan

No	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Telepon otomatis/non otomatis	1 unit	
2	Radio telekomunikasi	-	
3	Faximile	1 Unit -	
4	Komputer	5 unit	

5	Mesin Tik	1 unit	
6	Meja kursi sice/tamu	2 unit	
7	Meja kerja	14 buah	
8	Kursi kerja	13 buah	
9	Meja sidang	1 unit	
10	Lemari besi	3 buah	
11	Filling cabinet	6 buah	
12	TV	1 unit	
13	Handy cam	-	
14	Camera	1 Unit	
15	Ruang rapat	1 unit	
16	Aula/gedung pertemuan	1 unit	
17	Ruang data/operasi room	-	
18	Kendaraan dinas roda 2	2 unit	
19	Kendaraan dinas roda 4	1 Unit	Suzuki Pic Up
20	Gor	1 Unit	

C. Kelembagaan

Dalam menjalankan roda pemerintahan, kelurahan Pasirbiru di bagi dalam jumlah 65 RT serta 12 RW sebagai berikut:

Jumlah RT/RW

No	Jumlah RW	Jumlah RT
1	RW. 01 BABAKAN DESA	5 RT
2	RW. 02 GUDANG SIKAT	6 RT

3	RW. 03 KEBON TERONG	5 RT
4	RW. 04 BABAKAN DANGDEUR	6 RT
5	RW. 05 MEKARJATI	7 RT
6	RW 06 J ATI	5 RT
7	RW 07 JATI KALER	5 RT
8	RW 08 BABAKAN SARI	5 RT
9	RW 09 MEKARSARI	5 RT
10	RW 10 SUKASARI	5 RT
11	RW 11 CIKUDA	5 RT
12	RW 12 SUKALUYU	6 RT
	JUMLAH	65 RT

a. Kejuaraan lomba Kelurahan yang pernah diraih

No	Tahun	Juara	Tingkat	Ket.
1	2005	II	Kecamatan Cibiru	Lomba P2 WKSS Tingkat Kecamatan Cibiru
2	2006	I	Propinsi Jabar	Lomba 10 prog PKK
3	2006	1	Kota Bandung	Lomba Posyandu Tingkat Kota Bandung
4	2006	III	Tk. Kecamatan	Lomba HKG PKK- KB-KES Tingkat Kecamatan

5			Tk.Kecamatan	Lomba GSI Tingkat Kecamatan
6	2007	I	Kota Bandung	Lomba GSI
7	2007	II	TK .Provinsi Jawa Barat	Lomba 10 Program PKK Tingkat Propinsi Jabar
8	2008	II	Kota Bandung	Lomba Al-Barjanji Tingkat Kota
9	2009	I	Kota Bandung	Lomba solawat
10	2009	1	Kota Bandung	Lomba Karang Taruna
11	2010	Hrp 1	Kota Bandung	Lomba Kinerja Kelurahan
12	2010	I	Kota Bandung	Lomba Qasidah Tk Kota Bandung
13	2011	1	Tk Bandung Timur	Lomba Cerdas cermat Kader PKK
14	2012	1	Tk. Bandung Timur	Lomba Al Barjanji Tk Bantung Timur
15	2013	II	Tk. Kota Bandung	Lomba Masak Ikan PKK Tk Kota Bandung
16	2014		Tk Propinsi Jabar	Nominasi Kelurahan Kadarkum Tk Propinsi Jabar

17	2014		Tk Kota Bandung	Lomba Kinerja Kelurahan Tk Kota Bandung
18	2015			
19	2016			
20	2017	1	Kota Bandung	Lomba Olimpiade Kader Posyandu Tk Kota Bandung
21	2017	VII	Kota Bandung	10 Kelurahan Terbaik Tk.Kota Bandung

II. DATA DINAMIS

I. PEMERINTAHAN KELURAHAN

1. Kondisi Aparatur

Jumlah pegawai yang ada di kelurahan Pasirbiru adalah sejumlah 11 dengan rincian sebagai berikut :

- 1). Pegawai negeri sipil (PNS) di kelurahan sebanyak 8 orang
- 2). Calon PNS ada orang
- 3). Tenaga kontrak kerja (TKK), 4 Orang
- 4). Tenaga magang, sebanyak Tidak ada
- 5). Tenaga relawan, sebanyak Tidak ada

Komposisi Aparatur Kelurahan

NO	NAMA NIP TMP, TGL LAHIR	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN (Tmt)	KET
1	ADAD MUJAHIDIN,SE	III/d	Lurah	
2	IHSAN FURQON,SE	III/d	Sekretaris lurah	
3	AAN ROSANAH ,S.Pd	III/c	Kasi. Ekbang dan LH	
4	Drs. R.IWAN H.	III/d	Kasi. Kesejahteraan sosial	
5	HANISAH HR	II/c	Administrasi Keuangan	
7	IMA FOURNIMA S.	II/c	Administrasi Pelayanan Khusus	
8	ROHMAT	I/c	Administrasi Umum	
9	YUGA NUGRAHA. S.Pd		Operator Komputer	
10	EKA PERMANA PUTRA.S.Sos		Operator Komputer	
10	TOHARUDIN DADANG		Administrasi Umum	
11	SITI ALMAIDAH		Administrasi Pelayanan	

Komposisi Karyawan Berdasarkan Eselonering

NO	ESELONERING	L	P	JUMLAH
1	Eselon IV.a	1	-	1
2	Eselon IV.b	1	4	5

Komposisi Karyawan Berdasarkan Pangkat/Golongan

No	Pangkat/gol	L	P	JUMLAH
1	IV/d	-	-	-
2	IV/c	-	-	-
3	IV/b	-	-	-
4	IV/a	-	-	-
5	III/d	3	-	3
6	III/c	1	-	1
7	III/b	-	1	1
8	III/a	-	-	-
9	II/d	-	-	-
10	II/c	-	1	1
11	II/b	-	1	1
12	II/a	-	-	-
13	I/d	-	-	-
14	I/c	1	-	1
15	I/b	-	-	-
16	I/a	-	-	-


2. Kependudukan

Kelurahan Pasirbiru memiliki jumlah penduduk 13.323 jiwa pada tahun 2017 terdiri dari 6.629 jiwa laki-laki dan 6694 jiwa perempuan. Jumlah kepala Keluarga di kelurahan Pasirbiru saat ini mencapai sekitar 5.695 KK. Berdasarkan data kependudukan dari Kelurahan pasirbiru pada tahun 2017 yang dilihat dari segi kepadatan penduduk sebesar 121.12


jiwa per m² dan dilihat dari pertumbuhan penduduk, intensitas populasinya akan terus bertambah dari waktu ke waktu.

4.2 Analisis dan Pembahasan Hasil Penelitian


4.2.1 Analisis Sistem Informasi Penilaian (SIP) Bandung Juara



SIP
(Sistem Informasi Penilaian)



SIP adalah aplikasi yang dikelola oleh Pemerintah Kota Bandung untuk menjadi sarana penampung informasi bagi kelurahan dan kecamatan di seluruh Kota Bandung. Aplikasi berbasis web ini dapat diakses melalui alamat: sip.bandung.go.id



Aplikasi ini memiliki 3 fungsi utama antara lain :



Sebagai Media
Pelaporan Kegiatan



Sebagai Media
Penampung Data



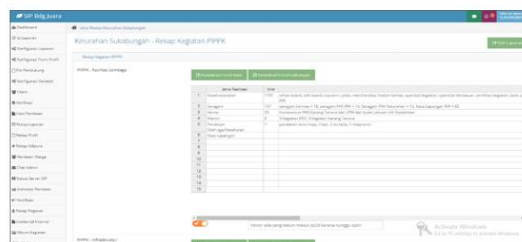
Sebagai Media
Penilaian Kinerja



SIP SISTEM
INFORMASI
PENILAIAN



Sebagai Media Penampung Data



Lewat fitur “laporan insidental” yang ada di aplikasi ini, Pemerintah Kota bisa melakukan permintaan data apapun sesuai kebutuhan kepada kelurahan dan kecamatan. Sebagai contoh, Pemerintah Kota bisa meminta rekap jumlah dan biodata ‘Pasukan Guber’ di setiap kelurahan dan menampungnya di aplikasi ini.



SIP SISTEM
INFORMASI
PENILAIAN



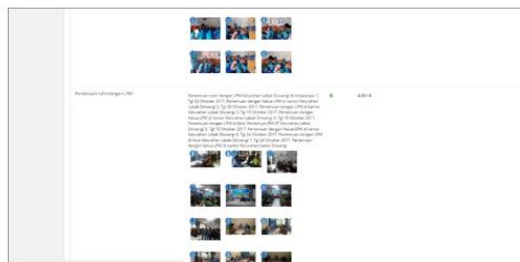
Sebagai Media Penilaian Kinerja

No.	Kelurahan	Nilai Dasar	Nilai Laporan	Nilai Penilaian	Nilai Akhir
1	Chandika	80,00	80,00	80,00	80,00
2	Senayan	80,00	80,00	80,00	80,00
3	Senayan Barat	80,00	80,00	80,00	80,00
4	Senayan Timur	80,00	80,00	80,00	80,00
5	Senayan Selatan	80,00	80,00	80,00	80,00
6	Senayan Utara	80,00	80,00	80,00	80,00
7	Senayan Tengah	80,00	80,00	80,00	80,00
8	Senayan Barat Daya	80,00	80,00	80,00	80,00
9	Senayan Utara Daya	80,00	80,00	80,00	80,00
10	Senayan Selatan Daya	80,00	80,00	80,00	80,00
11	Senayan Barat Daya	80,00	80,00	80,00	80,00
12	Senayan Utara Daya	80,00	80,00	80,00	80,00
13	Senayan Selatan Daya	80,00	80,00	80,00	80,00
14	Senayan Barat Daya	80,00	80,00	80,00	80,00
15	Senayan Utara Daya	80,00	80,00	80,00	80,00
16	Senayan Selatan Daya	80,00	80,00	80,00	80,00
17	Senayan Barat Daya	80,00	80,00	80,00	80,00
18	Senayan Utara Daya	80,00	80,00	80,00	80,00
19	Senayan Selatan Daya	80,00	80,00	80,00	80,00
20	Senayan Barat Daya	80,00	80,00	80,00	80,00

Dengan mengamati kualitas laporan bulanan, tahunan, dan insidental serta kedisiplinan kelurahan dan kecamatan dalam melakukan pelaporan. Pemerintah Kota bisa menilai kompetensi dan kualitas kinerja di setiap kelurahan dan kecamatan dalam menjalankan tugas-tugas dasarnya.



Sebagai Media Pelaporan Kegiatan



Lewat aplikasi ini, kelurahan dan kecamatan melaporkan kegiatannya setiap bulan secara rutin. Di akhir tahun, kelurahan dan kecamatan pun akan menyampaikan laporan tahunan yang menjadi gambaran kegiatan di OPD masing-masing selama setahun penuh.



Periode dan Indikator Penilaian

Periode penilaian antara lain :

12 Bulan, dimulai November (Tahun Ini) s/d Oktober (Tahun Depan)

Indikator penilaian antara lain :

1. Kualitas Pelayanan Publik
2. Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum
3. Ketertiban, Kebersihan, Keindahan, dan Lingkungan Hidup
4. Inovasi, Kreativitas, dan Peningkatan Indeks Kebahagiaan
5. Kedisiplinan Pelaporan Melalui SIP



SIP SISTEM
INFORMASI
PENILAIAN



Pada akhir periode penilaian, Pemerintah Kota akan menyusun rapor kinerja Lurah dan Camat selama periode tersebut berdasarkan kualitas laporan dan kedisiplinan pelaporan melalui aplikasi SIP. Setelah itu, evaluasi akhir akan dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut :

1. Berdasarkan nilai rapor yang telah diberikan, Pemerintah Kota akan menyusun *Ranking Sementara* dari seluruh Kelurahan dan Kecamatan se-Kota Bandung
2. 10 kelurahan dan 10 kecamatan dengan peringkat teratas akan diminta untuk menyampaikan pemaparan/ekspos di hadapan Tim Penilai dan Tim Penguji.
3. Tim Penilai dan Tim Penguji akan memberikan penilaian berdasarkan pemaparan dari 10 kelurahan dan 10 kecamatan terbaik.
4. Nilai tersebut akan diakumulasikan dengan nilai laporan SIP dengan komposisi 10% nilai pemaparan dan 90% nilai laporan SIP untuk menentukan nilai dan peringkat akhir kelurahan dan kecamatan terbaik.



SIP SISTEM
INFORMASI
PENILAIAN

Sistem Informasi Penilaian (SIP) BANDUNG JUARA tersebut merupakan Sistem Informasi yang berfungsi sebagai :

1. Bahan penilaian kinerja camat dan lurah,
2. Media komunikasi dan pembinaan antara Bagian Pemerintahan Umum dengan kewilayahan

Instrumen penilaian yang akan dinilai dalam evaluasi kinerja Camat dan Lurah se-Kota Bandung adalah :

(1) Kualitas Pelayanan Publik, terdiri dari :

- a. Laporan Bulanan Kecamatan
 - A. Persentase Keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti
 - B. Aktifitas media sosial
 - C. Rekap pelayanan
- b. Laporan Tahunan Kecamatan
 1. Ketersediaan Media Sosial
 2. Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan
 3. Kriteria Penilaian Ombudsman
- c. Laporan Bulanan Kelurahan
 1. Persentase Keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti.
 2. Aktifitas media sosial.
- d. Laporan Tahunan Kelurahan

1. Ketersediaan Media Sosial
2. Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan
3. Kriteria Penilaian Ombudsman

(2) Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan

a. Laporan Bulanan Kecamatan

1. Laporan kependudukan bulanan
2. Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu
3. Laporan bulanan daftar hadir pegawai
4. Laporan insidental yang diminta pimpinan daerah tepat waktu
5. Laporan kegiatan harian camat
6. Laporan bulanan daftar apel pegawai
7. Pertemuan rutin dengan Pembina Kesejahteraan Keluarga (PKK)
8. Pertemuan rutin dengan Karang Taruna
9. Pertemuan rutin dengan RW
10. Pertemuan rutin dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

b. Laporan Tahunan Kecamatan

1. Persentase Kelurahan berkinerja baik
2. Persentase RW Juara
3. Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif
4. Capaian Target PBB
5. Capaian Target Penilaian Prestasi Kerja PNS

6. Data Rawan Bencana

c. Laporan Bulanan Kelurahan

1. Persentase Laporan kegiatan bulanan ke kecamatan tepat waktu
2. Persentase Laporan insidental yang diminta pimpinan daerah tepat waktu
3. Pertemuan rutin dengan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
4. Pertemuan rutin dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
5. Pertemuan rutin dengan Karang Taruna
6. Pertemuan rutin dengan RT/RW

d. Laporan Tahunan Kelurahan

1. Profil Kelurahan disampaikan tepat waktu
2. Persentase RW Juara
3. Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif (LPM, Karang Taruna, PKK dibuktikan dengan SK, Program Kerja, 60% rencana kerja dilaksanakan, menghadiri kegiatan kota minimal 2 kali dalam 1 tahun)
4. Capaian Target PBB
5. Capaian Target Penilaian Prestasi Kerja PNS

(3) Ketertiban, Kebersihan, Keindahan dan Lingkungan Hidup

a. Laporan Bulanan Kecamatan

1. Persentase zona merah tingkat kecamatan yang tertib
 2. Persentase kecamatan yang melampaui rasio linmas
 3. Persentase kerb di jalan protokol yang telah dicat pada triwulan 3
 4. Persentase kerb di jalan protokol yang tidak ada rumput liar/gulma pada setiap triwulan
 5. Persentase jalan protokol yang bebas sampah setiap triwulan
 6. Persentase saluran air di jalan protokol yang bebas sampah setiap triwulan
 7. Persentase pelaksanaan GPS tiga kali seminggu dalam sebulan
 8. Jumlah minimal Pohon yang ditanam dalam satu tahun
 9. Rasio lubang resapan biopori / rumah sebesar 1:1
- b. Laporan Tahunan Kecamatan
1. Rasio Sumur Resapan / RW, 1:1
- c. Laporan Bulanan Kelurahan
1. Persentase kerb di jalan protokol yang telah dicat pada triwulan 3
 2. Persentase kerb di jalan protokol yang tidak ada rumput liar/gulma pada setiap triwulan
 3. Persentase jalan protokol yang bebas sampah setiap triwulan
 4. Persentase saluran air di jalan protokol yang bebas sampah setiap triwulan
 5. Persentase Siskamling tingkat RW yang aktif

6. Jumlah minimal Pohon yang ditanam dalam satu tahun
 7. Rasio lubang resapan biopori / rumah sebesar 1:1
 8. Kegiatan GPS
- d. Laporan Tahunan Kelurahan
1. Rasio Sumur Resapan / RW, 1:1
 2. Rasio Petugas Linmas
- (4) Inovasi, kreativitas dan Peningkatan Indeks Kebahagiaan.
- a. Laporan Bulanan Kecamatan
1. Makan Bersama warga miskin
 2. Jum'at keliling (nga-Bandungan)
 3. Persentase Culinary Night 1 bulan 1 kali
 4. Ketersediaan Jaringan Internet
 5. Inovasi Pelayanan
- b. Laporan Tahunan Kecamatan
1. Command Center / Control Room
 2. Realisasi Program Inovasi Pemberdayaan Pembangunan Kewilayahan (PIPPK)
 3. Prestasi yang diraih Kecamatan
- c. Laporan Bulanan Kelurahan
1. Makan Bersama warga miskin 1 bulan sekali
 2. nga-Bandungan (Jumling/pengajian/kumpul warga/mapay lembur)

3. Persentase Nonton Bareng 1 bulan 1 kali
 4. Ketersediaan Jaringan Internet
 5. Inovasi Pelayanan
- d. Laporan Tahunan Kelurahan
1. Penggunaan e-kelurahan
 2. Realisasi Program Inovasi Pemberdayaan Pembangunan Kewilayahan (PIPPK)
 3. Prestasi yang diraih Kelurahan

Tata cara penilaian dilakukan dengan self assesment yang diunggah oleh pihak Kecamatan dan Kelurahan di aplikasi SIP BDG JUARA, sesuai dengan indikator penilaian yang harus dipenuhi sesuai dengan 4 Komponen utama yang sudah disebutkan diatas.

Tim Penilai dalam evaluasi kinerja Camat dan Lurah ini terdiri dari berbagai SKPD terkait yaitu :

1. Staf Ahli Walikota Bidang Pembangunan dan Infrastruktur
2. Dinas Komunikasi Dan Informasi
3. Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
4. Badan Kesatuan Bangsa Dan Pemberdayaan Masyarakat
5. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
6. Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya
7. Badan Pengelola Lingkungan Hidup
8. Badan Kepegawaian Daerah

9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
10. Dinas Pemakaman Dan Pertamanan
11. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
12. Dinas Sosial
13. Dinas Kesehatan
14. Bagian Hukum dan HAM
15. Bagian Pemerintahan Umum
16. Bagian Organisasi Dan Pemberdayaan Aparatur Daerah
17. Satuan Polisi Pamong Praja.

Hasil penilaian kinerja Camat dan Lurah melalui aplikasi SIP BDG Juara ini dituangkan dalam Lembar Penilaian Kinerja Camat/Lurah (rapot Camat/Lurah) sebagai berikut :

1. Kecamatan
 - A. Hijau = 25 (tahun 2015 = 18, tahun 2014 = 14)
 - B. Kuning = 5 (tahun 2015 = 10, tahun 2014 = 16)
 - C. Merah = 0 (tahun 2015 = 2)
2. Kelurahan
 - A. Hijau = 83 (tahun 2015 = 67, tahun 2014 = 10)
 - B. Kuning = 56 (tahun 2015 = 57, tahun 2014 = 110)
 - C. Merah = 12 (tahun 2015 = 27, tahun 2014 = 31)

Sistem informasi penilaian ini juga melibatkan masyarakat untuk bersama-sama menilai kinerja pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan.

4.2.2 Analisis Kinerja Camat Dan Lurah Kota Bandung

a. Produktifitas

Dalam hasil telaah yang dilakukan oleh peneliti pada proses wawancara pada pihak informan terkait bahwa dengan adanya *Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1354 tentang Penilaian Kinerja Camat dan Lurah Kota Bandung* menjadi salah satu keputusan untuk mengetahui bagaimana Kinerja Camat dan Lurah Kota Bandung dilapangan, dan dengan di realisasikannya aplikasi SIP Bandung Juara dengan semua instrumennya menjadikan para aparatur sipil bekerja dengan lebih terarah, lebih disiplin dan lebih taat administrasi . Sejak di realisasikannya pula aplikasi ini sangat begitu membantu sekali para aparatur sipil dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada bapak Drs. Tatang Hamdani, M.AP, beliau selaku Kepala Sub Bagian Bina Kewilayahan di Kantor Bagian Pemerintahan Umum Kota Bandung, sebagai informan pertama dalam penelitian ini beliau ini lah yang mengetahui bagaimana Sistem Informasi Penilaian (SIP) Bandung Juara di realisasikan, jadi terkait efektif dan efisiennya kinerja camat dan lurah setelah di realisasikannya aplikasi Sistem Informasi Penilaian (SIP) Bandung Juara. Berikut jawaban beberapa informan :

“Aplikasi ini sebenarnya beranjak dari keinginan bapak Ridwan Kamil selaku pimpinan yang pada waktu itu baru menjabat sebagai Wali Kota Bandung pada tahun 2014, beliau ingin memberikan sebuah penghargaan ataupun Reward kepada camat dan lurah Kota Bandung. Dan kami dari bagian pemerintahan daerah kota bandung mencoba memfasilitasi

keinginan beliau. Melalui bentuk laporan Fisik Kecamatan dan Kelurahan, pada waktu itu hal ini dilakukan persemester yaitu 6 bulan laporan kecamatan dan kelurahan dalam bentuk fisik. Namun mekanisme seperti ini dinilai kurang efektif dan lebih banyak subjektifnya, jadi misalnya siapa yang dekat dengan atasan ataupun pimpinan maka dia yang mendapat nilai dengan kinerja terbaik dan dengan waktu penilaian yang tidak jelas juga dalam menilai laporan ini dan dianggap mekanisme seperti ini kurang Ferr. Dan beranjak dari tahun pertama dengan menilai banyak sekali kekurangan maka kami bagian pemerintahan menyiapkan mekanisme yang di anggap lebih ferr lebih efektif dan dinilai lebih subjektif dalam melakukan penilaian dalam pelaporan.

Pada tahun 2015/2016 ini lah maka difasilitasilah Aplikasi ini, aplikasi yang kita ketahui ini. Aplikasi ini tidak semata-mata untuk menilai saja, akan tetapi lebih ke sarana untuk rekan-rekan dikewilayahan menyampaikan laporan dan juga sebagai alat pimpinan untuk memantau kinerja yang dilakukan rekan-rekan dikewilayahan dan sekaligus memberi rangking atas aktivitas kegiatan yang dilakukan.”

Berdasarkan jawaban dari informan pertama, peneliti setuju dengan jawaban yang diberikan oleh informan, karena jawaban yang diberikan sesuai dengan yang dilapangan. Dimana cerita bagaimana SIP itu direalisasikan dan tanggapan yang diceritakan oleh informan pertama sesuai dengan informan-informan selanjutnya yang menjadi nara sumber bagi peneliti.

Kemudian peneliti melanjutkan pertanyaan mengenai perbedaan sebelum dan sesudah terkait Kinerja Camat Dan Lurah Kota Bandung sejak di realisasikannya aplikasi ini, jawaban beliau adalah :

“Kinerja camat dan lurah kota banudng mungkin lebih terarah dengan diadakannya Instrumen yang suda ditetapkan dan sudah di sepaki bersama oleh bapak Wali Kota dan seluruh Camat an Lurah Kota Bandung.

Untuk perbedaannya pada saat belum direalisasikan nya aplikasi ini, para pegawai masih belum terarah, masih banyak yang belum begitu

mengerti dengan tugas dan kewajibannya sebagai aparatur sipil negara. Ya mereka mengerti tugas mereka sebagai pemberi pelayanan publik, tapi tidak hanya itu saja. Contohnya pada saat mereka datang pagi pulang sore, lalu mereka bekerja memberikan pelayanan publik, tapi tidak ada bukti dan data yang membuktikan bahwa mereka bekerja dengan semestinya.

Sedangkan dengan direalisasikannya aplikasi ini dengan seluruh instrumen yang ada, mereka bekerja dengan lebih terarah jadi lebih mengerti lagi bagaimana tugas dan fungsi serta kewajiban mereka sebagai aparatur sipil negara yang memang harus taat administratif dengan segala bukti dan data yang seharusnya.”

Kemudian peneliti melakukan kegiatan wawancara pada informan kedua yaitu dengan bapak Lurah Pasir Biru beserta Admin Operator aplikasi Sistem Informasi Penilaian (SIP) Bandung Juara yaitu bapak Ahmad Mujahidin S.E.,MM selaku Lurah Pasir Biru dan Yuga Nugraha Fadilah. S.Pd selaku Admin Operator Aplikasi SIP Bandung Juara. Untuk kali ini peneliti mewawancarai bapak lurah beserta adminnya, hal ini dilakukan di Kelurahan Pasir Biru, kenapa, karena sesuai data Evaluasi Kinerja Camat dan Lurah Kota Bandung Kelurahan Pasir Biru pada tahun 2016 menduduki posisi ke 39 sebagai lurah dengan kinerja terbaik, sedangkan pada tahun 2017, Kelurahan Pasir Biru mendapatkan posisi nomor 7 dengan kinerja terbaik. Kelurahan ini mengalami banyak peningkatan. Maka dari itu peneliti menetapkan bapak Lurah beserta Adminnya sebagai informan kedua, peneliti menanyakan terkait perbedaan kinerja sesudah dan sebelum di realisasikannya aplikasi SIP Bandung Juara, berikut jawabannya :

“Untuk perbedaan saat sesudah dan sebelum di realisasikannya aplikasi SIP ini sangat signifikan sekali, dari tingkat kehadiran, lalu kinerja yang diberikan juga sudah baik. Kenapa? Karena jika kehadiran saja tidak disiplin maka kinerja pun melemah, nah jika kinerjanya bagus maka kegiatan pun ada. Jadi kegiatan itu sendiri bisa dilaporkan ke aplikasi SIP ini.

Jadi SIP ini sangat membawa perubahan yang sangat signifikan, dan SIP ini salah satu wadah untuk merangkum seluruh kegiatan yang ada di kewilayahan ini.”

Peneliti sangat setuju dengan jawaban informan yang kedua bahwa dengan di realisasikannya aplikasi ini maka LANJUTKAN BANDUNG JUARA, agar dalam proses pelayanan publik lebih baik lagi lebih terarah.

Kemudian peneliti melakukan wawancara pula pada Admin Kecamatan Cinambo, yaitu bapak Andri Herdiansyah M.AD selaku admin operator aplikasi SIP Bandung Juara dan selaku informan ketiga. Kecamatan Cinambo ini adalah Kecamatan yang menduduki posisi nomor 1 pada hasil Evaluasi Kinerja Terbaik pada tahun 2016 dan 2017. Pada beliau lah peneliti melakukan wawancara dan memberikan beberapa pertanyaan terkait hal yang diperlukan oleh peneliti, maka peneliti pun menanyakan terkait perbedaan kinerja saat sebelum dan sesudah di realisasikannya aplikasi SIP Bandung Juara, berikut jawaban beliau adalah :

“Perbedaannya sesudah dan sebelum direalisasikannya aplikasi ini perubahannya sangat signifikan sekali karena dengan di realisasikannya aplikasi SIP Bandung Juara ini kinerja kita jauh lebih terarah lagi. Jadi dulu poin-poin yang dituju memang sudah ada namun belum terlalu jelas, tapi sejak adanya aplikasi SIP ini menjadi lebih jelas lagi, dengan poin-poin yang tertera pada instrumen penelitian yang sudah ditetapkan dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. dan dengan kita mencapai poin-poin kegiatan aktivitas pada instrumen penilaian maka kita pula menjadi lebih dekat dengan masyarakat.”

Peneliti setuju dengan jawaban dari informan pertama mengenai perbedaan kinerja terkait sesudah dan sebelum di realisasikannya aplikasi SIP Bandung Juara ini. Karena untuk saat ini sejak sudah direalisasikannya aplikasi ini kerja aparatur sipil ini

dalam memberikan pelayanan publik lebih terarah lebih banyak menjalankan aktivitas terjun langsung berhadapan dengan masyarakat dan lebih mengetahui bagaimana kondisi masyarakat.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa terkait Kinerja Camat Dan Lurah Kota Bandung memang sangat signifikannya setelah di realisasikannya aplikasi Sistem Informasi Penilaian (SIP) Bandung Juara. Karena dengan direalisikannya aplikasi SIP Bandung Juara ini menjadi lebih terarah, proses penilaian yang transparan dan objektif pun di dukung oleh semua pihak terkait. Dan dengan kendala dan segala permasalahan yang di alami itulah dinamika dimasing-masing kecamatan dan kelurahan di lingkungan kota Bandung. Peneliti pun setuju dengan jawabannya terkait bahwa aparatur sipil negara harus taat administrasi dan harus tahu tugas, fungsi dan kewajiban aparatur sipil dalam memberikan pelayanna publik, serta dengan di realisasikannya aplikasi ini kinerja para Camat dan Lurah Kota Bandung menjadi lebih efektif dan efisien.

b. Kualitas Pelayanan Publik

Aplikasi ini merupakan sebuah sistem informasi yang menjadi wadah bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam menilai kinerja layanan di kecamatan dan kelurahan Kota Bandung. Manfaat yang diharapkan oleh Pemerintah Kota Bandung dari aplikasi ini adalah meningkatnya kinerja pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan. Selain itu juga diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk mau berpartisipasi dalam pembangunan Kota Bandung. Melihat besarnya

potensi manfaat yang dapat diperoleh oleh pemerintah daerah lain melalui aplikasi sistem informasi penilaian ini.

Kualitas pelayanan ini dibuktikan dengan ranking yang diterima oleh para Camat dan Lurah dengan penilaian yang sudah disimpulkan oleh by sistem.

Berikut adalah data yang diterima dari hasil akhir Evaluasi Kinerja Camat dan Lurah Kota Bandung.

Tabel 4.1
10 KELURAHAN DENGAN KINERJA TERBAIK

NO	KELURAHAN	NILAI
1.	SUKABUNGAH	92.99
2.	PAJAJARAN	90.69
3	SUKAMISKIN	88.55
4	CISARANTEN WETAN	87.75

5	LEBAK SILIWANGI	87.36
6	BABAKAN	87.12
7	PASIR BIRU	86.08
8	SUKAMULYA	85.73
9	MALABAR	85.55
10	CIPEDES	85.17

Sumber Data : Hasil Evaluasi Kinerja Camat dan Lurah Kota
Bandung 2017

Tabel 4.2

10 KECAMATAN DENGAN KINERJA TERBAIK

NO	KECAMATAN	NILAI
1	CINAMBO	94.36
2	BATUNUNGGAL	90.20
3	LENGKONG	88.25

4	PANYILEUKAN	87.73
5	ANTAPANI	87.69
6	CIBEUNYING KALER	87.41
7	CIDADAP	87.39
8	SUKAJADI	87.27
9	BOJONGLOA KIDUL	87.18
10	COBLONG	87.09

Sumber Data : Hasil Evaluasi Kinerja Camat dan Lurah Kota Bandung
2017

Tabel 4.3

10 KECAMATAN DENGAN KINERJA TERBAIK

No	KECAMATAN	NILAI AKHIR
1	Kecamatan Cinambo	93.03
2	Kecamatan Sukasari	88.47
3	Kecamatan Astana Anyar	86.59
4	Kecamatan Sumur Bandung	86.33
5	Kecamatan Coblong	86.26
6	Kecamatan Lengkong	86.19
7	Kecamatan Cibiru	86.18
8	Kecamatan Cicendo	86.09
9	Kecamatan Cibeunying Kidul	85.92
10	Kecamatan Bojongloa Kidul	85.76

Sumber Data : Hasil Evaluasi Kinerja Camat dan Lurah Kota Bandung
2016

Tabel 4.4

10 KELURAHAN DENGAN KINERJA TERBAIK

No	KELURAHAN	NILAI AKHIR
1	Kelurahan Sukagalih	91.14
2	Kelurahan Sarijadi	90.43
3	Kelurahan Cisaranten Wetan	89.76
4	Kelurahan Palasari	89.32
5	Kelurahan Rancabolang	86.94
6	Kelurahan Malabar	86.22
7	Kelurahan Cisaranten Endah	86.21
8	Kelurahan Nyengseret	86.08
9	Kelurahan Cisurupan	86.07
10	Kelurahan Turangga	84.92

Sumber Data : Hasil Evaluasi Kinerja Camat dan Lurah Kota Bandung 2016

Tabel di atas menjelaskan pula bahwa kinerja lurah dalam memberikan pelayanan publik sangat baik, dengan nilai yang seperti itu bahwa masyarakat pun puas atas pelayanan yang diberikan oleh kecamatan dan kelurahan. Sebenarnya dalam aplikasi ini juga ada banyak begitu peran masyarakat. bahkan Aplikasi yang dapat di akses melalui alamat sip.bandung.go.id. aplikasi ini merupakan sebuah sistem informasi yang menjadi wadah bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam menilai kinerja layanan di kecamatan dan kelurahan Kota Bandung. Hasil penilaian masyarakat pada website ini menjadi salah satu indikator walikota dalam menilai kinerja Lurah dan Camat. Melalui website SIP Bdg Juara ini, manfaat yang

diharapkan oleh pemerintah kota Bandung adalah meningkatnya kinerja pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan. Selain itu juga diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk mau berpartisipasi dalam pembangunan kota Bandung.

Namun pada realita nya dilapangan situs yang dibuat untuk mengukur kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan banyak masyarakat yang tidak mengetahui hal tersebut, karena ketika masyarakat memiliki kendala atau masalah atas pelayanan yang diberikan oleh pegawai kecamatan atau kelurahan, atau dalam masalah apapun, pihak pemerintah kota bandung menyiapkan aplikasi lain yaitu aplikasi Lapor.go.id . jadi ketika masyarakat memiliki keluhan masyarakat bisa komplain langsung secara online melalui aplikasi Lapor.go.id.

c. Responsivitas (Cepat Tanggap)

Dalam memberikan pelayanan publik, para paratur sipil negara harus memiliki sipat Responsivitas selalu cepat tanggap atas apa yang diperlukan oleh masyarakat. karena dengan reponsivitas yang kita berikan terhadap masyarakat, masyarakat sendiri akan merapa puas atas pelayanan yang telah didapatkan.

Dalam aplikasi sistem Informasi Penilaian (SIP) Bandung Juara ini, dalam pelaksanaan instrumen penilaian yang sudah ditetapkan. Harus adanya koordinasi antara pihak Kecamatan dan Kelurahan Kota Bandung terhadap masyarakat lingkungannya sendiri. Karena dengan dibangunnya koordinasi yang baik antara masyarakat dengan aparatur sipil negara yang berada di Kecamatan atau Kelurahan dapat membuat kinerja Camat dan Lurah menjadi lebih baik lagi.

Para pegawai Kecamatan dan Kelurahan Kota Bandung adalah salah satu aktor yang berperan penting dalam pelayanan publik, karena mereka lah yang lebih dekat dengan masyarakat. Oleh karena itu para pegawai tersebut memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelaksana pengaplikasian Sistem Informasi Penilaian (SIP) Bandung Juara. Kepada informan terkait maka peneliti menanyakan terkait seberapa tanggap pegawai dalam memberikan pelayanan publik, apaun jawaban dari informan terkait adalah :

“dari setiap pegawai yang ada di Kecamatan dan Kelurahan Kota Bandung pastinya mereka sadar akan tugas, fungsi dan kewajibannya sebagai aparatur sipil negara dan mereka mempunya tanggung jawab yang besar dan proses pelayanna publik, jadi mereka harus benar-benar memberikan dan menunjukkan kinerja yang bagus.”

Berdasarkan hasil telaah yang dilakukan oleh peneliti dan melihat kondisi dilapangan bahwa kemampuan para pegawai atau tenaga kerja yang berada di Kecamatan dan Kelurahan bekerja dengan sangat baik, namun pada instrumen penilaian aplikasi Sistem Informasi Penilaian (SIP) Bandung Juara para pegawai memang di tuntun untuk terjun langsung dalam menjalankan aktivitas sesuai dengan instrumen yang di sepakati. Meskipun dalam kinerjanya sudah bagus tapi masih saja adanya kendala yang terjadi, misalnya terkait pengumpulan data ketika upload foto dalam aplikasi SIP Bandung Juara ini.

d. Responsibilitas (pelayanan sesuai SOP)

Sebagaimana yang di atur oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik pada Pasal 15 bahwa penyelenggara pelayanan publik

berkewajiban untuk memberikan pelayanan yang berkualitas dan melaksanakan layanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah disusun. Dalam hal ini pemerintah baik di pusat maupun di daerah terus berupaya melakukan perbaikan dalam memberikan pelayanan publik. adapun peneliti menanyakan pada informan kesatu yaitu bapak Tatang Hamdani A.MD selaku Kepala Sub Bagian Bina Kewilayahan terkait SOP untuk aplikasi SIP Bandung Juara ini, berikut jawaban informan terkait :

“Jadi dalam aplikasi Sistem Informasi Penilaian (SIP) Bandung Juara tidak ada Standar Operasional Pelayanan yang khusus, untuk SOP nya masih sama saja dengan standar operasional pelayanan yang ada, namun aplikasi ini didukung dengan adanya Peraturan Wali Kota Bandung dan Surat Keputusan Wali Kota Bandung terkait aplikasi SIP Bandung Juara ini, serta adanya Manual Book dan panduan aplikasi Sistem Informasi Penilaian (SIP) Bandung Juara untuk Kecamatan dan Kelurahan yang di jadikan bahan acuan pengisian laporan pada aplikasi SIP Bandung Juara. “

Jadi kesimpulannya dalam implementasi aplikasi SIP Bandung Juara ini tidak adanya SOP khusus yang dibuat untuk mendukung pengaplikasian SIP Bandung Juara ini. namun aplikasi ini didukung oleh Peraturan Wali Kota dan Keputusan Wali Kota Bandung serta adanya Manual Book dan Panduan Aplikasi untuk Kecamatan dan Kelurahan Kota Bandung.

e. Akuntabilitas (Konsisten pegawai)

Para camat dan lurah Kota Bandung dalam aplikasi ini harus konsisten dalam menjalankan penyampaian laporan instrumen yang tertera pada instrumen penilaian aplikasi SIP Bandung Juara. Karena dengan konsistennya para camat dan lurah menyampaikan laporan sesuai dengan instrumen penilaian, maka

mereka yang konsisten akan mendapat nilai yang maksimal dan akan memperoleh posisi 10 besar camat dan lurah dengan kinerja terbaik akan menerima reward yang diberikan oleh pimpinan. Sebagaimana hal yang di sampaikan oleh informan terkait, berikut jawabannya :

“Ibu camat nya sendiri selalu mengingatkan, agar lebih konsisten lagi dalam memberikan pelayanan publik, mengingatkan kembali tugas, fungsi dan kewajiban dalam memberikan pelayanan publik, hanya saja pesan dari ibu camatnya adalah “ terkait kalau kita juara masuk dalam 10 besar ya itu bonus, disini kita tidak mengejar juara, yang terpenting itu adalah semua kegiatan yang ada pada instrumen aplikasi SIP Bandung Juara ini sebenarnya adalah kewajiban kita semua, kita hanya melaksanakan kewajiban kita dengan maksimal untuk masalah nanti juara ya itu bonus, dan biarkan tingkat kota yang menilai”. Jadi pesan itu lah yang menjadi kan kita agar tetap memberikan pelayanan yang paling maksimal untuk masyarakat.”

Dengan hal tersebut di buktikan bahwa konsisten lagi dalam melakukan pelaporan sesuai dengan instrumen penilaian, karena dalam hal memberikan pelayanna publik itu adalah kewajiban kita selaku aparatur sipil negara.

4.2.3 Implemtasi Aplikasi Sitem Informasi Penilaian (SIP) Bandung Juara

Bagian Pemerintahan Umum Kota Bandung mengeluarkan Surat Keputusan Wali Kota Bandung : Nomor 138/Kep.656-Bag.Pem.Um/2016 tentang Tim Penilai Evaluasi Kinerja Camat dan Lurah di Lingkungan Kota Bandung menjadikan suatu bukti bahwa dengan adanya Tim Penilai yang di buat maka pengaplikasian Sistem Informasi Penilaian (SIP) Bandung Juara harus berjalan baik. Pada tahun 2016 dari data yang di peroleh dari Hasil Akhir Evaluasi Kinerja Camat dan Lurah Kota Bandung bahwa Implemtasi Aplikasi Sistem Informasi Penilaian (SIP) Bandung masih memiliki banyak kendala seperti :

- Terbatasnya SDM di Kelurahan dan Kecamatan
- Belum terkoneksi system yang mendukung penilaian
 - Konektifitas dengan Disdukcapil terkait kependudukan
 - Konektifitas dengan BKBPM terkait progress PIPPK melalui PRISM
 - Konektifitas dengan Disyanjak terkait dengan realisasi target PBB
 - Konektifitas dengan DPKAD terkait dengan asistensi anggaran
 - Konektifitas dengan BKD terkait dengan kepegawaian
- Masih adanya kecamatan dan kelurahan yang tidak bisa mengisi kegiatan yang merupakan indikator penilaian karena belum dianggarkan atau dialihkan ke kegiatan yang lain.

Dengan masalah atau kendala-kendala yang disebutkan di atas maka peneliti melakukan kembali wawancara kepada informan pertama yaitu bapak Drs. Tatang Hamdani, M.AP, beliau selaku Kepala Sub Bagian Bina Kewilayahan di Kantor Bagian Pemerintahan Umum Kota Bandung, dalam penelitian ini beliau ini lah yang mengetahui Bagaimana implementasi aplikasi sistem informasi penilaian (SIP) bandung juara di kecamatan dan keluarahan kota bandung. Adapun jawaban beliau adalah :

“Sampai sejauh ini sejak direalisasikannya aplikasi ini, dalam proses implementasi aplikasi ini berjalan baik-baik saja ya meskipun masih banyaknya kendala yang di alami, masih harus rajin kami dari bagian pemerintahan mengingatkan untuk mnegisi laporan. tingkat intensitas meningkatnya lebih ekstra, karena masih banyak yang belum begitu mengerti bagaiman amelakukan pengisian aplikasi ini.

Sebenarnya aplikasi ini memberikan peluang untuk kecamatan dan kelurahan untuk merekrut tenaga IT untuk membantu melaksanakan instrumen yang ada. Karena mengingat kondisi SDM dikita juga mempunyai keterbatasan.

Untuk implementasi aplikasi ini juga kami dari bagian pemerintahan menyediakan atau memfasilitasi segala sarana dan prasarana seperti ketersediaan jaringan di kantor kecamatan dan kelurahan sudah di siapkan beritupun dengan perangkat kerasnya seperti komputer itu sudah pasti ada, artinya semua sudah disiapkan begitupun dengan oprator adminnya pun diberikan, tinggal bagaimana operator tersebut membantu kecamatan atau kelurahan tersebut. Dan tinggal masing-masing bagaimana managernya menggunakan sarana dan prasarana seta SDM yang diberikan untuk konsisten dan rutin untuk menyampaikan laporan, karena kita tahu dalam proses pengisian laporan pada aplikasi ini tidak bisa bekerja sendiri, dan harus bekerjasama semuanya, karena aplikasi ini banyak berhubungan dengan banyak orang.”

Berdasarkan jawaban dari informan pertama, peneliti sangat setuju karena apa yang dijelaskan oleh infroman pertama memang sesuai dengan yang dilapangan bahwa implemntasi aplikasi SIP Bandung Juara sampai saat ini berjalan baik-baik saja, bahkan lebih baik dari sebelumnya karena banyaknya updating sistem yang dilakukan dari tahun ketahun untuk mengoptimalkan pengaplikasian aplikasi SIP Bandung Juara ini.

Kemudian peneliti menanyakan pula terkat kendala yang di alami selama tahun 2017 kepada informan pertama, dan jawaban beliau adalah :

“Untuk kendala sendiri pada tahun 2017 ini tidak begitu banyak yang dialami. Karena secara pribadi saya sendiri tidak terlalu konsen terhadap aplikasi ini, karena saya merasa ah, anka-anak pun (bawahan saya) dirasa sudah mengerti dan paham pada aplikasi ini, dan dirasa tidak banyak masalah seperti pada tahun pertama, dan saya rasa rekan-rekan dikewilayahan pun dirasa sudah mengerti apa yang harus dilakukan jadi saya anggap mengelir begitu saja.

Tapi yang luar biasanya agak berbeda juga hasilnya untuk tahun ini, yang tadinya ada kecamatan atau kelurahan yang berada

diposisi 10 besar dengan kinerja terbaik menjadi agak bergeser ke posisi 20 besar, tapi ya tidak papa ya ini namanya dinamika.”

Pada saat tahun 2016 dari hasil Evaluasi Kinerja tahun 2016, bahwa terdapat kendala terkait Sumber Daya Manusia (SDM) di kewilayahan dan Server di tahun 2016 yang masih menjadi kendala. Lalu peneliti pun menanyakan terkait kendala apa saja yang terjadi di tahun 2017, dan jawaban beliau adalah :

“Terkait kendala Sumber Daya Manusia (SDM) di kewilayahan tahun 2017 ini juga tetapa menjadi kendala mengingat ya pegawai kita juga memiliki keterbatasan. Sudah berbagai cara di atasi namun tetap saja menjadi kendala karena beberapa faktor seperti faktor usia misalnya, karena PNS yang belum berakhir masanya.

Untuk terkait server pada tahun ini sudah tidak begitu dirasakan bahkan sudah di atasi, ya meskipun ada, namun hanya sedikit saja yang kadang dikecamatan atau kelurahan tidak dapat menginput data maka kami dari bagian pemerintahan memberitahukannya melalui group Whatsapp yang kita buat khusus dengan para admin operator aplikasi ini. Jika terjadi pun hanya beberapa menit dan tidak sampai stuck beberapa hari.

Untuk kendala sendiri pada tahun 2017 ini tidak begitu banyak yang dialami. Karena secara pribadi saya sendiri tidak terlalu konsen terhadap aplikasi ini, karena saya merasa ah, anak-anak pun (bawahan saya) dirasa sudah mengerti dan paham pada aplikasi ini, dan dirasa tidak banyak masalah seperti pada tahun pertama, dan saya rasa rekan-rekan di kewilayahan pun dirasa sudah mengerti apa yang harus dilakukan jadi saya anggap mengelir begitu saja.

Tapi yang luar biasanya agak berbeda juga hasilnya untuk tahun ini, yang tadinya ada kecamatan atau kelurahan yang berada diposisi 10 besar dengan kinerja terbaik menjadi agak bergeser ke posisi 20 besar, tapi ya tidak papa ya ini namanya dinamika.”

Peneliti setuju dengan jawaban dari informan pertama karena hal tersebut sesuai dengan realita kejadian dilapangan, bahwa terkait Sumber Daya Manusia (SDM) di kewilayahan tetap menjadi salah satu kendala yang terjadi di kewilayahan, dan untuk server sendiri peneliti pun mensyukuri bahwa di tahun

2017 pun untuk kendala server sudah teratasi, dan hal tersebut ketika di konfirmasi ke lapangan ya begitu adanya sesuai dengan fakta yang ada.

Kemudian peneliti pun menanyakan lagi kepada informan kedua terkait kendala Sumber Daya Manusia yang terjadi dikewilayahan sebagaimana yang disebutkan oleh informan pertama, Dari data evkin yang penulis peroleh pada tahun 2016 dan 2017, kendala Sumber Daya Manusia menjadi permasalahan di kewilayahan. Bagaimana dengan Kelurahan Pasir Biru ini, mengalami kendala yang sama atau tidak, berikut jawaban adalah :

“Untuk SDM sendiri sepertinya tidak yak, kenapa? Katrena SDM ini kan sebenarnya menjadi salah satu syarat untuk memberikan pelayanan publik yang maksimal demi kepuasan masyarakat sendiri. Lalu SDM disetiap kelurahan pun sudah dibatasi, jadi ketika mau memenangkan posisi jabatan Kasi misalnya ya minimal harus berpendidikan akhir S1, nah untuk adminnya sendiri pun harus S1, nah beda kan dengan pasukan Gober yang bisa lulusan apa saja. Karena ini juga kan sebenarnya SDM juga menjadi salah satu faktor dalam meningkatkan kinerja.

Untuk kendala tersebut ternyata di tampik oleh bapak Lurah Pasir Biru, karena di kelurahan pasir biru ini tidak mengalami hal tersebut sehingga dapat menduduki posisi nomor 7 dengan kinerja terbaik dan masuk untuk 10 besar kelurahan dengan kinerja terbaik. Namun kendala SDM ini di alami oleh narasumber berikutnya yaitu informan ketiga.

Kemudian peneliti pun menanyakan terkait permasalahan apa saja yang terjadi pada tahun 2016, saat posisi Kelurahan Pasir Biru berada di posisi ke 39, berikut jawabannya adalah :

“Untuk terkait kendala pada tahun 2016. Setelah saya menerima hasil raport akhir, saya berikan ke admin operator SIP nya, agar tahu apa saja yang harus dibenahi. (Pak Lurah Pasir Biru).

Nah dari hasil evaluasi kinerja di tahun 2016, kami kelurahan pasir biru mendapatkan posisi nomor 39 dengan perolehan nilai akhir 81,58. Nah setelah saya amati memang ternyata dari point-point yang sesuai dengan instrumen yang ada, adanya salah satu point yaitu point penghijauan. Nah di tahun 2016 pada instrumen penghijauan ada yang belum terealisasi, seperti vertical garden. Karena jujur pada tahun 2016 untuk vertical garden ini hanya terdapat di beberapa RW saja, belum semuanya. Lalu pada awal tahun 2017 ketika rapat koordinasi dengan pa lurah serta kasi dan pegawai lainnya, saya pribadi mengajukan untuk point pada instrumen SIP yang penghijauan yaitu vertical garden untuk di tingkatkan, dan di adakan pada setiap RW. Nah dari situ ketika sudah direalisasikan mendapat penilaian yang semakin mneingkat, yang tadinya nilai agak menurun menjadi semakin meningkat dan mendapat nilai yang maksimal untuk point penghijauan. (Admin Operator SIP)”

Dan itulah permasalahan-permasalahan yang di alami oleh Kelurahan Pasir Biru pada saat tahun 2016, yang mungkin pula di alami oleh beberapa Kelurahan yang lainnya di lingkungan Kota Bandung.

Kemudian peneliti juga menanyakan kepada informan ketiga terkait kendala yang dialami pada tahun 2016 dan 2017 yang terjadi di kecamatan Cinambo ini, berikut jawaban dari Admin Operator Aplikasi SIP Bandung Juara :

“ya meskipun kecamatan cinambo berada di posisi nomor 1 selama 2 tahun terkahir ini, namun ya ada saja kendalanya, terutama kendala yang sampai saat ini terjadi yaitu masalah pengumpulan data, kerena semua instrumen yang ada di dalam aplikasi SIP Bandung Juara ini mengikat keseluruhan kasi yang ada di kecamatan ini, jadi intrumen yang dijalankan adalah gabungan dari semua kasi dan tidak bisa hanya dilakukan oleh ibu camat sendiri. Dan kegiatan ini kan kegiatan rutin setiap bulan, namun yang menjadi kendalanya masih belum adanya inisiatif secara berkala dalam hal melaporkan hasil kegiatannya, jadi saya selaku admin dan pengumpul data harus tetap mengingatkan dan meminta laporannya, jadi tetap dengan sistem jempot bola.

Dan untuk kendala Sumber Daya Manusia (SDM) sendiri memang masih menjadi kendala karena dalam menjalankan aktivitas instrumen yang ada kita perlu banyak Sumber Daya Manusia, contohnya pada kasi Kesos yang tidak ada pegawai laki-lakinya, sedangkan pada instrumen penilaian ada poin Solat Subuh dan Solat Jum'at berjamaah, nah untuk hal tersebut jadi saya yang harus menghandle kegiatan tersebut. Karena keterbatasan SDM tersebut ketika ada kasi yang kekurangan personil maka kita harus saling melengkapi. “

Peneliti setuju dengan jawaban yang diberikan oleh informan karena jawaban informan memang sudah sesuai dengan realita dilapangan.

Dengan adanya program SIP Bdg Juara maka pihak kecamatan dan kelurahan mengetahui target-target pekerjaan yang harus dilaksanakan. Para Camat dan Lurah merasa terpacu kinerjanya dikarenakan adanya monitoring langsung dari pimpinan dan jajarannya. Namun pada intinya, pelaksanaan tugas-tugas dilaksanakan bukan karena menjalankan program SIP Bdg Juara saja tapi karena memang kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kinerja camat dan lurah kota bandung dapat di buktikan dengan adanya Instrumen Penilaian yang telah di sepakati bersama oleh Wali Kota Bandung dengan para Camat dan Lurah Kota Bandung, dengan adanya Instrumen Penilaian yang telah di sepakati menjadi tolak ukur bagi para Camat dan Lurah Kota Bandung dalam menjalankan seluruh kegiatan terutama lagi dalam hal pelayannya publik. karena indikator atau instrumen ini lah yang di jadikan pedoman dalam memberikan pelayanan publik. Berikut adalah Indikator Penilaian SIP :

KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Pengaduan Masyarakat	
Nilai 0	Kosong / Laporan dan Foto Palsu
Nilai 2	<i>Keterangan :</i> Tidak Ada <i>Foto/Dokumen :</i> -
Nilai 3	<i>Keterangan :</i> Tidak Ada <i>Foto/Dokumen :</i> Bukti (Laporan Tidak Resmi)
Nilai 4	<i>Keterangan :</i> Ada/Tidak Ada <i>Foto :</i> Bukti (Kotak Pengaduan atau Laporan Resmi)

Ketersediaan Akun Media Sosial	
Nilai 0	Kosong / Laporan dan Foto Palsu
Nilai 1	<i>Keterangan :</i> Akun Tidak Aktif <i>Foto :</i> Minimal 1
Nilai 2	<i>Keterangan :</i> Akun Aktif <i>Foto :</i> Minimal 1

KINERJA TUGAS UMUM

Persentase Laporan Kegiatan	
Nilai 0	Kosong / Laporan dan Foto Palsu
Nilai 2	<i>Keterangan :</i> - <i>Foto/Dokumen :</i> 1 Bukti Laporan
Nilai 3	<i>Keterangan :</i> - <i>Foto/Dokumen :</i> 2 Bukti Laporan
Nilai 4	<i>Keterangan :</i> - <i>Foto/Dokumen :</i> >3 Bukti Laporan

Persentase Laporan Insidental	
Otomatis	

Pertemuan Rutin PKK	
Nilai 0	Kosong / Laporan dan Foto Palsu
Nilai 1	<i>Keterangan :</i> Kosong / Tempat dan Tanggal
	<i>Foto :</i> Minimal 1 / Kosong
Nilai 2	<i>Keterangan :</i> Tidak ada tanggal
	<i>Foto :</i> Minimal 1
Nilai 3	<i>Keterangan :</i> Tempat dan Tanggal Sesuai Foto
	<i>Foto :</i> Minimal 2
Nilai 4	<i>Keterangan :</i> Tempat dan Tanggal Sesuai Foto
	<i>Foto :</i> Minimal 3

Pertemuan Rutin LPM	
Nilai 0	Kosong / Laporan dan Foto Palsu
Nilai 1	<i>Keterangan :</i> Kosong / Tempat dan Tanggal
	<i>Foto :</i> Minimal 1 / Kosong
Nilai 2	<i>Keterangan :</i> Tidak ada tanggal
	<i>Foto :</i> Minimal 1
Nilai 3	<i>Keterangan :</i> Tempat dan Tanggal Sesuai Foto
	<i>Foto :</i> Minimal 2
Nilai 4	<i>Keterangan :</i> Tempat dan Tanggal Sesuai Foto
	<i>Foto :</i> Minimal 3

Pertemuan Rutin Karang Taruna	
Nilai 0	Kosong / Laporan dan Foto Palsu
Nilai 1	<i>Keterangan :</i> Kosong / Tempat dan Tanggal
	<i>Foto :</i> Minimal 1 / Kosong
Nilai 2	<i>Keterangan :</i> Tidak ada tanggal
	<i>Foto :</i> Minimal 1
Nilai 3	<i>Keterangan :</i> Tempat dan Tanggal Sesuai Foto
	<i>Foto :</i> Minimal 2
Nilai 4	<i>Keterangan :</i> Tempat dan Tanggal Sesuai Foto
	<i>Foto :</i> Minimal 3

Pertemuan Rutin RT/RW	
Nilai 0	Kosong / Laporan dan Foto Palsu
Nilai 1	Keterangan : Kosong / Tempat dan Tanggal
	Foto : Minimal 1 / Kosong
Nilai 2	Keterangan : Tidak ada tanggal
	Foto : Minimal 1
Nilai 3	Keterangan : Tempat dan Tanggal Sesuai Foto
	Foto : Minimal 2
Nilai 4	Keterangan : Tempat dan Tanggal Sesuai Foto
	Foto : Minimal 3

LINGKUNGAN

Persentase Pengecatan Kerb	
Nilai 0	Kosong / Laporan dan Foto Palsu
Nilai 1	Keterangan : -
	Foto : Minimal 1
Nilai 2	Keterangan : - / <80%
	Foto : Minimal 1
Nilai 3	Keterangan : - / <80%
	Foto : Minimal 2
Nilai 4	Keterangan : 80% / -
	Foto : Minimal 2 / Minimal 3

Persentase Pembersihan Kerb Dari Gulma	
Nilai 0	Kosong / Laporan dan Foto Palsu
Nilai 1	Keterangan : -
	Foto : Minimal 1
Nilai 2	Keterangan : - / <80%
	Foto : Minimal 1
Nilai 3	Keterangan : - / <80%
	Foto : Minimal 2
Nilai 4	Keterangan : 80% / -
	Foto : Minimal 2 / Minimal 3

Persentase Pembersihan Kerb Dari Barangkal	
--	--

Nilai 0	Kosong / Laporan dan Foto Palsu	
Nilai 1	Keterangan :	-
	Foto :	Minimal 1
Nilai 2	Keterangan :	- / <80%
	Foto :	Minimal 1
Nilai 3	Keterangan :	- / <80%
	Foto :	Minimal 2
Nilai 4	Keterangan :	80% / -
	Foto :	Minimal 2 / Minimal 3

Persentase Saluran Air Bebas Sampah		
Nilai 0	Kosong / Laporan dan Foto Palsu	
Nilai 1	Keterangan :	-
	Foto :	Minimal 1
Nilai 2	Keterangan :	- / <80%
	Foto :	Minimal 1
Nilai 3	Keterangan :	- / <80%
	Foto :	Minimal 2
Nilai 4	Keterangan :	80% / -
	Foto :	Minimal 2 / Minimal 3

Persentase Siskamling Tingkat RW Yang Aktif		
Nilai 0	Kosong / Laporan dan Foto Palsu	
Nilai 2	Keterangan :	-
	Foto :	Minimal 1
Nilai 3	Keterangan :	-
	Foto :	Minimal 2
Nilai 4	Keterangan :	-
	Foto/Dokumen :	Jadwal/Absen

PENGHIJAUAN

Penanaman Pohon					
Nilai 0	Kosong / Laporan dan Foto Palsu				
Nilai 1	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"><i>Keterangan :</i></td> <td style="width: 50%;">Tempat dan Tanggal</td> </tr> <tr> <td><i>Foto :</i></td> <td>Minimal 1</td> </tr> </table>	<i>Keterangan :</i>	Tempat dan Tanggal	<i>Foto :</i>	Minimal 1
<i>Keterangan :</i>	Tempat dan Tanggal				
<i>Foto :</i>	Minimal 1				

Vertical Garden					
Nilai 0	Kosong / Laporan dan Foto Palsu				
Nilai 1	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"><i>Keterangan :</i></td> <td style="width: 50%;">Tempat dan Tanggal</td> </tr> <tr> <td><i>Foto :</i></td> <td>Minimal 1</td> </tr> </table>	<i>Keterangan :</i>	Tempat dan Tanggal	<i>Foto :</i>	Minimal 1
<i>Keterangan :</i>	Tempat dan Tanggal				
<i>Foto :</i>	Minimal 1				

Rooftop Garden					
Nilai 0	Kosong / Laporan dan Foto Palsu				
Nilai 1	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"><i>Keterangan :</i></td> <td style="width: 50%;">Tempat dan Tanggal</td> </tr> <tr> <td><i>Foto :</i></td> <td>Minimal 1</td> </tr> </table>	<i>Keterangan :</i>	Tempat dan Tanggal	<i>Foto :</i>	Minimal 1
<i>Keterangan :</i>	Tempat dan Tanggal				
<i>Foto :</i>	Minimal 1				

Penanaman Pohon di Media Pot					
Nilai 0	Kosong / Laporan dan Foto Palsu				
Nilai 1	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"><i>Keterangan :</i></td> <td style="width: 50%;">Tempat dan Tanggal</td> </tr> <tr> <td><i>Foto :</i></td> <td>Minimal 1</td> </tr> </table>	<i>Keterangan :</i>	Tempat dan Tanggal	<i>Foto :</i>	Minimal 1
<i>Keterangan :</i>	Tempat dan Tanggal				
<i>Foto :</i>	Minimal 1				

Rasio Lubang Resapan Biopori/Rumah 1:1					
Nilai 0	Kosong / Laporan dan Foto Palsu				
Nilai 2	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"><i>Keterangan :</i></td> <td style="width: 50%;">Tidak Ada Perbandingan</td> </tr> <tr> <td><i>Foto :</i></td> <td>Minimal 1</td> </tr> </table>	<i>Keterangan :</i>	Tidak Ada Perbandingan	<i>Foto :</i>	Minimal 1
<i>Keterangan :</i>	Tidak Ada Perbandingan				
<i>Foto :</i>	Minimal 1				
Nilai 3	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"><i>Keterangan/Dokumen :</i></td> <td style="width: 50%;">Tidak Ada Perbandingan</td> </tr> <tr> <td><i>Foto :</i></td> <td>Minimal 2</td> </tr> </table>	<i>Keterangan/Dokumen :</i>	Tidak Ada Perbandingan	<i>Foto :</i>	Minimal 2
<i>Keterangan/Dokumen :</i>	Tidak Ada Perbandingan				
<i>Foto :</i>	Minimal 2				
Nilai 4	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"><i>Keterangan/Dokumen :</i></td> <td style="width: 50%;">Ada Perbandingan</td> </tr> <tr> <td><i>Foto :</i></td> <td>-</td> </tr> </table>	<i>Keterangan/Dokumen :</i>	Ada Perbandingan	<i>Foto :</i>	-
<i>Keterangan/Dokumen :</i>	Ada Perbandingan				
<i>Foto :</i>	-				

GPS

Nilai 0	Kosong / Laporan dan Foto Palsu	
Nilai 1	Keterangan :	Tidak Ada Tanggal
	Foto :	Minimal 1
Nilai 2	Keterangan :	Tempat, dan Tanggal Sesuai Foto
	Foto :	Minimal 1
Nilai 3	Keterangan :	Tempat, dan Tanggal Sesuai Foto
	Foto :	Minimal 2
Nilai 4	Keterangan :	Tempat, dan Tanggal Sesuai Foto
	Foto :	Minimal 3

INOVASI & KREATIFITAS

Makan Bareng Warga Miskin		
Nilai 0	Kosong / Laporan dan Foto Palsu	
Nilai 1	Keterangan :	Tidak Ada Tanggal
	Foto :	Minimal 1
Nilai 2	Keterangan :	Tempat, dan Tanggal Sesuai Foto
	Foto :	Minimal 1
Nilai 3	Keterangan :	Tempat, dan Tanggal Sesuai Foto
	Foto :	Minimal 2
Nilai 4	Keterangan :	Tempat, dan Tanggal Sesuai Foto
	Foto :	Minimal 3

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Pengajian atau Kumpul Warga		
Nilai 0	Kosong / Laporan dan Foto Palsu	
Nilai 1	Keterangan :	Tidak Ada Tanggal
	Foto :	Minimal 1
Nilai 2	Keterangan :	Tempat, dan Tanggal Sesuai Foto
	Foto :	Minimal 1
Nilai 3	Keterangan :	Tempat, dan Tanggal Sesuai Foto
	Foto :	Minimal 2
Nilai 4	Keterangan :	Tempat, dan Tanggal Sesuai Foto
	Foto :	Minimal 3

Nonton Bareng	
Nilai 0	Kosong / Laporan dan Foto Palsu
Nilai 1	Keterangan :
	Foto :
Nilai 2	Keterangan :
	Foto :
Nilai 3	Keterangan :
	Foto :
Nilai 4	Keterangan :
	Foto :

Ketersediaan Jaringan Internet	
Nilai 0	Tidak Tersedia / Kosong / Laporan dan Foto Palsu
Nilai 2	Keterangan :
	Foto :
Nilai 4	Keterangan :
	Foto :

Inovasi Pelayanan	
Nilai 0	Kosong / Laporan dan Foto Palsu
Nilai 1	Keterangan :
	Foto :
Nilai 2	Keterangan :
	Foto :
Nilai 3	Keterangan :
	Foto :

Dengan adanya instrumen ini, para camat dan lurah kota bandung harus menjalankan semua aktivitas yang terdapat pada poin-poin yang sudah ditetapkan sebagai instrumen atau indikator penilaian. Dengan dijadikannya pula indikator ini sebagai pedoman dalam pelayanan publik maka kinerja camat dan lurah Kota Bandung akan menjadi lebih terarah, jadi dengan instrumen ini aparatur negara dapat bekerja dengan maksimal. Dan dengan di jadikannya indikator ini sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik kinerja yang akan dilakukan oleh camat dan lurah kota bandung pun akan maksimal. Meskipun masih adanya kendala yang terjadi sampai saat ini.

Kemudian peneliti pun menanyakan terkait kesulitan para camat dan lurah kota bandung dalam melaksanakan kegiatan poin-poin yang sudah ada, dan menanyakan pula seberapa sering para camat dan lurah kota bandung terjun langsung melaksanakan seluruh aktivitas yang ada pada instrumen penilaian ke lapangan. Pertanyaan ini diajukan pada informan kedua dan ketiga. Pertanyaan ini tidak diajukan kepada informan pertama karena pada hakikatnya yang menjalankan seluruh aktivitas ataupun kegiatan yang ada pada indikator penilaian itu Camat dan Lurah Kota Bandung. Berikut jawaban yang di berikan oleh informan kedua adalah :

“Dalam hal pengisian instrumen ini masih adanya kendala yang terjadi perihal dalam pengumpulan data poin-perpoin yang ada di instrumen penilaian. Karena banyaknya poin yang ada di dalam instrumen penilaian. Dan dalam pengisian data pada aplikasi para camat dan lurah

Kota Bandung Bukan sering lagi namanya tapi hampir semua kegiatan atau aktivitas dalam instrumen aplikasi SIP ini berhubungan langsung dengan pak lurahnya. Bahkan hampir foto yang dilaporkan pun foto pak lurah. Jadi memang pak lurah selalu terjun dan memantau langsung kegiatan yang dilaksanakan.”

Hal serupa pun ditanyakan pada bapak Andri Herdiansyah M.AD selaku Admin Operator SIP Bandung Juara, berikut jawaban beliau adalah :

“Bukan sering lagi namanya tapi hampir semua kegiatan atau aktivitas dalam instrumen aplikasi SIP ini berhubungan langsung dengan ibu camatnya. Bahkan hampir foto yang dilaporkan pun foto ibu camatnya. Jadi memang pak lurah selalu terjun dan memantau langsung kegiatan yang dilaksanakan.

Terlebih lagi pada tahun 2017 ini, sudah diadakannya pembaharuan sistem jadi ada verifikasi ibu camatnya dalam pelaporan poin-poin sebelum di upload ke aplikasi SIP Bandung Juara.”

Dengan jawaban yang diberikan oleh informan kedua hampir sama saja, jadi memang setiap camat dan lurah wajib berada pada saat aktivitas atau kegiatan sesuai instrumen penilaian dilaksanakan.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa implementasi Aplikasi Sistem Informasi Penilaian (SIP) Bandung Juara berjalan dengan baik, diterima dengan baik oleh para Camat dan Lurah Kota Bandung, meskipun terdapat beberapa kendala yang masih terjadi di kewilayahan, seperti Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih tetep menjadi kendala dalam menjalankan proses kegiatan aktivitas sesuai yang ada pada instrumen penilaian yang sudah di tetapkan, dan untuk terkait kendala server yang masih terjadi pada tahun 2016, untuk tahun 2017 ini sudah di atasi.

4.2.4 Faktor yang mempengaruhi kinerja dalam pengaplikasian Sistem Informasi Penilaian (SIP) Bandung Juara.

SIP Bdg Juara merupakan sistem informasi yang dibangun untuk menilai kinerja kecamatan dan kelurahan. Sistem informasi ini membantu pemerintah Kota Bandung untuk mendigitalisasi laporan kegiatan dari kewilayahan (kecamatan dan kelurahan). Selain itu, SIP bdg Juara juga menjadi media bagi masyarakat kota Bandung untuk memberi penilaian terhadap kinerja layanan yang diberikan oleh kecamatan dan kelurahan. Kemudian, laporan kegiatan dari kecamatan dan kelurahan serta penilaian dari masyarakat yang diunggah melalui SIP Bdg Juara menjadi indikator dalam menyusun rapor setiap Camat dan Lurah di Kota Bandung. Jika Camat dan Lurah mendapat hasil penilaian yang baik maka akan diberikan *reward* sebagai imbalan dari kinerja mereka.

Dalam hasil telaah yang dilakukan oleh peneliti pada proses wawancara pada pihak informan terkait bahwa diketahui faktor yang mempengaruhi kinerja camat dan lurah kota bandung ada beberapa hal yang mempengaruhi kinerja dalam pengaplikasian Sistem Informasi (SIP) Bandung Juara ini berjalan dengan baik. Dan untuk lebih jelasnya peneliti melakukan wawancara dengan informan pertama terkait faktor pendukung seperti apa saja yang ada dalam pengaplikasian Sistem Informasi Penilaian (SIP) Bandung Juara. Berikut jawaban beliau :

“Untuk faktor pendukung sendiri, karena adanya keinginan dari bapak Wali Kota untuk memberikan reward pada camat dan lurah dengan kinerja terbaik maka bagian pemerintahan daerah memfasilitasi nya dengan di adakannya aplikasi ini. Dengan menyipakan segala sarana dan prasaran yang dibutuhkan seperti jaringan dikantor berikut dengan perangkat kerasnya.

Dan dengan pimpinan memberikan rangking dan diberikannya reward pada 10 camat dan kelurahan dengan kinerja terbaik, memacu agar berlomba-lomba untuk memberikan pelayanan terbaik dengan data bukti yang akurat sesuai dengan instrumen yang sudah ditetapkan.”

Peneliti pun setuju dengan apa yang dikatakan oleh informan pertama bahwa selain direalisasikannya aplikasi ini keinginan bapak Wali Kota, dan dengan didukungnya sarana dan prasana serta reward yang diberikan dapat meningkatkan kinerja camat dan lurah Kota Bandung.

Kemudian peneliti pun menyakan pula Faktor penghambat apa saja yang terjadi dalam proses pengaplikasian Sistem Informasi Penilaian (SIP) Bandung Juara, dan jawaban beliau adalah :

“Faktor penghambatnya tidak hanya SDM dan Server yang terjadi namun juga belum adanya kebijakan terkait panysment untuk kecamatan atau kelurahan yang berada diposisi paling bawah. Logikanya ketika ada reward yang diberikan maka harus adanya panysment yang diterima, namun hal ini belum terrealisasi, karena mengingat banyak hal yang harus dipertimbangkan. Hal ini juga yang dijadikan alat oleh kecamatan dan kelurahan yang berada diposisi terbawah atau lebih pada posisi mengkhawatirkan. karena mereka selalu berpikir ah, biarlah orang lain yang mendapatkan rewardnya toh kita yang berada posisi mengkhawatirkan tidak mendapatkan panysment apapun dan dibiarkan begitu saja.

Dengan hal tersebut masih belum adanya peraturan ataupun kebijakan yang dikeluarkan itu menjadi salah satu kendala yang harus segera ditangani, karena dengan belum adanya kebijakan punishment yang ditetapkan, masih adanya camat dan lurah yang masih bekerja dengan santai-santai saja.

Kemudian peneliti pun menanyakan hal serupa terkait faktor yang mendukung dalam pengaplikasian Sistem Informasi Penilaian (SIP) Bandung Juara kepada informan kedua yaitu kepada bapak Ahmad Mujahidin S.E.,MM selaku Lurah Pasir Biru , dengan menanyakan faktor apa saja yang menjadi dukungan agar dapat menjalankan kinerja dengan maksimal, dan jawaban beliau adalah :

“faktor pendukung nya mungkin seperti diberikannya reward kepada 10 kelurahan terbaik dengan kinerja terbaik. Untuk rewardnya sendiri ketika menjadi 10 besar lurah dengan kinerja terbaik, selain kita mendapatkan penghargaan seperti plakat, yang luar biasanya di tahun 2017 kita diberikan study banding atau lebih di diklatkan lagi ke Korea Selatan.”

Sedangkan untuk faktor yang masing menjadi penghambat adalah :

“Untuk punishment sendiri ketika berada di posisi 39 tahun 2016, tidak ada sih, tidak ada panysment yang diberikan oleh pimpinan, paling hanya di ingatkan kembali agar tetap melakukan pengisian laporan dengan sesuai instrumen yang ada pada aplikasi SIP ini.”

Dengan hal tersebut maka sangat jelas sekali hal yang dijelaskan oleh informan pertama dan kedua, berjalannya implementasi aplikasi Sistem Informasi Penilaian (SIP) Bandung Juara, dengan reward yang diberikan oleh pimpinan kepada 10 camat dan lurah terbaik sangat berefek baik sekali sehingga camat dan lurah pun berlomba-lomba untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. namun dengan masih belum adanya kebijakan yang ditetapkan untuk punishment yang diberlakukan untuk camat dan lurah yang masih saja santai-santai dalam memberikan pelayannya publik.

Kemudian peneliti pun menanyakan hal serupa kepada admin operator Sistem Informasi Penilaian (SIP) Bandung Juara Kecamatan Cinambo sebagai

informan yang ke tiga, bertanya terkait faktor pendukung dan penghambat yang terjadi dalam proses pengaplikasian Sistem Informasi Penilaian (SIP)

Bandung Juara, berikut jawaban beliau :

“Untuk rewardnya sendiri ketika menjadi 10 besar lurah dengan kinerja terbaik, selain kita mendapatkan penghargaan seperti plakat, yang luar biasanya di tahun 2017 kita diberikan study banding atau lebih di diklatkan lagi ke Korea Selatan.”

Berdasarkan hasil kesimpulan dari beberapa informan terkait maka *Knowledge* mengacu pada pengetahuan yang dimiliki oleh pegawai (*Knowing what to do*) pada hakikatnya dengan di adakannya indikator aplikasi Sistem Informasi Penilaian (SIP) Bandung Juara mneuntut untuk para pegawai terutama para camat dan lurah kota bandung harus memiliki pengetahuan yang baik, *Skill* mengacu pada kemampuan untuk melakukan pekerjaan (*the ability to the well*) untuk skill sendiri para aparatur sipil negara sudah seharusnya memiliki kemampuan kinerja dalam memberikan pelayanan publik dituntut dengan tanggung jawab yang seharusnya,, motivasi adalah dorongan dan semangat untuk melakukan kerja untuk motivasi sendiri, memang sudah diperkuat dengan adanya keinginan pimpinan Wali Kota Bandung di dukung dengan adanya peraturan Wali Kota dan Keputusan Wali Kota terkait Tim Penilai Evaluasi Kinerja Camat dan Lurah Kota Bandung.

Secara keseluruhan setelah ditelaah dari hasil wawancara yang dilakukan oleh beberapa informan terkait, maka dari jawaban yang diberikan dari informan-informan terkait bahwa implementasi Aplikasi Sistem Informasi Penilaian (SIP) Bandung Juara sangat berjalan baik, selain faktor dukungan dengan dikeluarkannya surat Keputusan Wali Kota Bandung : Nomor

138/Kep.656-Bag.Pem.Um/2016 tentang Tim Penilai Evaluasi Kinerja Camat dan Lurah di Lingkungan Kota Bandung, serta sarana dan prasarana yang diberikan oleh pimpinan yang menjadi faktor pendukung dalam pengaplikasian Sistem Informasi Penilaian (SIP) Bandung Juara.

